



Original Article

Sejarah Pers di Sumatera Barat; dari Stensil Hingga Internet

Mardikola Tri Rahmad✉

Institut Darul Qur'an Payakumbuh, Indonesia

Correspondence Author: mardikolatirahmad@idaqupayakumbuh.ac.id

Abstract:

Penelitian ini membahas sejarah pers di Sumatera Barat, dari surat kabar era kolonial hingga transformasi digital yang menyesuaikan kemajuan teknologi dan budaya masyarakat melek digital. Tujuannya mengungkap dinamika perkembangan pers sebagai alat perjuangan dan informasi regional. Metode yang digunakan adalah pendekatan sejarah dengan langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, memanfaatkan data primer serta sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pers muncul sejak 1859 melalui surat kabar Belanda yang didominasi Indo-Eropa; periode 1900–1942 marak penerbitan setelah Minangkabau kuasai percetakan, meski kemunduran terjadi masa Jepang (1942–1945). Pasca-kemerdekaan 1945, media seperti Berjuang dan majalah Menara menggelorakan semangat perjuangan tanpa orientasi finansial; masa Liberal ramai didirikan surat kabar partai, terganggu PRRI dan pembredelan Orde Lama seperti Aman Makmur (1963). Orde Baru awal (1966–1974) berpihak pada pers, tapi sejak 1975 otoriter dengan pembredelan; Reformasi membuka kebebasan via UU No. 40/1999 dan SIUPP, memunculkan ratusan media cetak, daring, radio, televisi di Sumatera Barat, didorong transformasi digital yang mengalahkan cetak tradisional. Kesimpulannya, pers Sumatera Barat resilient terhadap tekanan politik-teknologi, menjadi cermin identitas Minangkabau; rekomendasi: perkuat literasi digital dan etika jurnalistik untuk masa depan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sejarah Pers, Surat Kabar, Media Online

Pendahuluan

Pers memiliki dua makna: sempit dan luas. Dalam arti luas, pers adalah media cetak dan elektronik yang menyampaikan laporan fakta, pendapat, ulasan, dan gambar kepada publik secara reguler (Supriyanto & Yusuf, 2007). Dalam arti sempit, pers merujuk pada media cetak seperti surat kabar harian, mingguan, majalah, dan bulletin (Thaib, 2014). Seiring berjalannya waktu, pers berasal dari padanan bahasa

Submitted	: 21 Januari 2026
Revised	: 25 Januari 2026
Acceptance	: 16 February 2026
Publish Online	: 17 February 2026

Belanda pers dan bahasa Inggris press, keduanya bermakna menekan atau mengepres, merujuk pada mesin yang menghasilkan lembaran kertas ([Fauzi, 2017](#)); ([Suryati, 2014](#)). Di Minangkabau, pers menjadi kajian menarik karena berhubungan erat dengan dinamika penjajahan dan peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Seiring sejarah, pers juga terkait dengan perkembangan Islam di Sumatera Barat; keduanya dianggap dua sisi dari satu mata uang yang membentuk pergolakan kaun Minangkabau dalam dunia jurnalistik. Perjalanan surat kabar di Sumatera Barat berlangsung panjang, menandai fase-fase sejak era kolonial hingga era modern, di mana dukungan teknologi dan sumber daya menentukan kemampuan daerah menghasilkan dan menyebarkan informasi lewat berbagai kanal.

Sejak 1859, Padang dan Sumatera Barat telah menjadi pusat industri surat kabar di Indonesia, dengan puluhan publikasi pada masa kolonial berkat kolaborasi Indo-Eropa dan peran Kaum Tionghoa sebelum penduduk pribumi menguasai percetakan ([Darwis, 2013](#)). Perkembangan ini menandai fase awal media massa daerah yang memanfaatkan mesin stensil untuk menggandakan artikel dan berita. Transisi teknologi kemudian mengantarkan pers ke ranah yang lebih luas: tidak hanya cetak, tetapi juga televisi dan media online. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak perusahaan pers di Sumatera Barat bertransformasi menjadi entitas daring atau menggabungkan format cetak-daring, sejalan dengan kemajuan teknologi digital dan perubahan perilaku audiens yang lebih banyak mengakses berita melalui ponsel maupun perangkat digital lainnya.

Urgensi menggali pers Minangkabau secara historis-angka menjadi penting karena: (1) warisan jurnalistik lokal adalah fondasi budaya informasi dan identitas regional; (2) pelajaran dari era kolonial memberikan konteks tentang bagaimana informasi membangun semangat perjuangan dan solidaritas komunitas; (3) peralihan ke media digital memerlukan kemampuan adaptasi, kelola sumber daya, dan jaminan kualitas konten agar tetap relevan bagi publik luas. Memahami dinamika ini membantu merancang kebijakan media yang berkelanjutan, meningkatkan literasi media, serta menjaga kualitas reporting yang faktual dan berimbang di era informasi yang serba cepat.

Beberapa kesenjangan utama yang perlu mendapat perhatian adalah: (1) kesenjangan akses dan kapasitas antara media tradisional cetak dengan media digital akses teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang mampu mengelola platform digital; (2) ketidakmerataan literasi media di berbagai kalangan masyarakat, sehingga tantangan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan bisa diverifikasi masih relevan; (3) potensi polarisasi informasi dan tekanan eksternal terhadap independensi redaksi, terutama di ranah regional yang memiliki dinamika sosial-politik khas; (4) kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi jurnalis lokal untuk menguasai praktik jurnalisme modern, etika, dan verifikasi fakta dalam lingkungan media yang cepat berubah. Menyoroti kesenjangan ini penting untuk merancang program penguatan pers yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian sejarah yang sistematis, mengikuti empat tahap utama sebagaimana dirumuskan Gottschalk (2006): heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan melalui pengumpulan sumber primer dan sekunder, mencakup literatur kepustakaan

seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang pers Sumatera Barat; dokumen arsip dari organisasi terkait seperti Serikat Penerbitan Surat Kabar (SPS), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), situs resmi Dewan Pers, serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); dan data digital dari repositori online serta wawancara mendalam dengan pelaku pers veteran untuk triangulasi. Selanjutnya, tahap kritik sumber melibatkan verifikasi internal (keakuratan isi, konteks, dan konsistensi) dan eksternal (keaslian, otentisitas, dan kredibilitas penulis/sumber) guna memastikan fakta sejarah bebas dari bias atau distorsi. Tahap interpretasi merangkai fakta-fakta tersebut secara analitis, mengidentifikasi pola perkembangan pers dari 1859 hingga era digital saat ini, dengan mempertimbangkan faktor politik, teknologi, dan sosial-budaya. Akhirnya, tahap historiografi menyusun narasi secara kronologis dan tematik menjadi rekonstruksi sejarah yang koheren, logis, dan obyektif, siap untuk disajikan dalam bentuk monografi atau artikel jurnal.

Hasil

Masa Kolonial

Perkembangan pers pada masa penjajahan ini, penulis mengelompokkan dalam tiga periodisasi, yakni periode awal, masa perkembangan, dan terakhir masa kemunduran atau dikekang. Periode awal masanya sejak 1859-1900, yang ditandai dengan penerbitan surat kabar berbahasa Belanda oleh orang Belanda. Selain itu, periode ini peranan orang Indo-Eropa cukup dominan dalam penerbitan dan percetakan di Minangkabau. Periode perkembangan dimulai sejak 1900-1942, selain banyak penerbitan surat kabar, usaha percetakan juga sudah dikuasai oleh dan dikelola oleh orang Minangkabau. Sementara itu, periode kemunduran atau dikekang dimulai selama masa penjajahan Jepang (1942-1945), sebab hampir semua surat kabar yang terbit masa Belanda dilarang terbit masa Jepang.

Mulai terbitnya surat kabar di Sumatera Barat

Pada awalnya penerbitan yang ada di Kota Padang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Pendiriannya untuk menerbitkan surat kabar, buku-buku dalam bahasa Belanda yang berisikan laporan-laporan administratif mengenai hasil perkebunan, pertambangan, dan pengamatan tentang daerah jajahan ([Sunarti, 2013](#)). Pers periode awal ditandai dengan penerbitan surat kabar berbahasa Belanda oleh Orang Belanda (Indo). Tujuan pendirian surat kabar itu untuk menyuarakan kepentingan pemerintahan atau kaum penjajah. Pemberitaan yang banyak adalah kejadian-kejadian di Sumatera Barat yang bersifat menegakkan *rest en orde* (ketenangan dan ketertiban), promosi kepentingan penjajah dan indo, informasi ekonomi, dan disamping itu juga melayani periklanan.

Surat kabar pertama kali terbit adalah *Sumatra Courant* pada tahun 1859 di bawah pimpinan L.N. H Chatelin. Pada mulanya, surat kabar ini terbit tidak teratur, sejak 1878 terbit dua kali seminggu. Penerbitan secara teratur itu semenjak adanya H. A. Mess. Ada dua pendapat dalam hal ini, yakni H. A. Mess hanya masuk atau bergabung dengan pada *Sumatra Courant*. Pendapat lainnya menyatakan *Sumatra Courant* berpindah tangan dari L.N. H Chatelin kepada H. A. Mess dengan tanpa alasan yang diketahui sebabnya. Surat kabar kedua milik kaum Indo adalah *Padangsche Nieuws En Advertentieblad* yang diterbitkan oleh Wijk Vam Ram. Media yang terbit mulai tahun 1863, ini terbit satu kali dalam seminggu, yakni pada hari sabtu. Sumber lain ada yang menyebutkan surat kabar ini terbit pada 1859, tepatnya bulan Desember. Akan tetapi kepastian mulai terbitnya surat kabar *Padangsche*

Nieuws En Advertentieblad ini dikemukakan oleh Sastri Sunarti setelah melakukan penelitian di Perpustakaan Nasional. Surat kabar ini lebih menitikberatkan fungsinya sebagai media yang berhubungan dengan bisnis, perdagangan, dan iklan.¹

Setelah *Sumatra Courant*, dua tahun kemudian atau tepatnya tahun 1871 terbit surat kabar *Padangsch Handelsblad* oleh perusahaan milik seorang Indo Eropa H. J. Klitsch. Surat kabar ini semulanya hanya mampu terbit dua kali seminggu, pada 1881 meningkat jadi tiga kali. Pemimpin redaksinya adalah seorang pengacara terkenal di Kota Padang Mr. J. Van Bosse. Pada tahun 1883, surat kabar ini berganti nama menjadi *Nieuws Padangsch Handelssblad*. Terakhir pada tahun 1900, surat kabar *Sumatra Courant* dan *Nieuws Padangsch Handelssblad* dilebur menjadi satu dengan nama *De Padanger*. Satu lagi surat kabar yang berpengaruh adalah *Sumatra Bode* yang dimiliki oleh Paul Bauemer. Media tersebut pertama kali terbit pada tahun 1892. Surat kabar ini mempunyai pengaruh yang cukup besar pengaruhnya. *Sumatra Bode* menjadi saingan terkuat surat kabar *De Padanger*, karena keduanya memiliki pengaruh yang cukup besar. *De Padanger* merupakan media massa yang menguasai opini publik pada bagian kedua abad ke-19. Berita-berita yang dimuat, sering kali menentang dan mengkritisi kebijakan Belanda.

Pada periode awal ini juga ada terbit surat kabar dalam bahasa melayu, tujuan penerbitannya agar isinya dapat dipahami oleh penduduk pribumi. Surat kabar ini masih diterbitkan oleh orang Indo yang tinggal di Minangkabau. Surat kabar berbahasa melayu yang tertua adalah *Bentara Melayu*, ia diterbitkan di Padang tahun 1877 dibawah pimpinan Arnold Snackey. Umur surat kabar ini hanya sebentar, yakni tidak sampai satu tahun, sebab akhir 1877 tidak terbit. Singkatnya umur surat kabar *Bentara Melayu* dapat dipahami karena waktu itu masyarakat Minangkabau masih banyak yang belum pandai membaca huruf latin sehingga surat kabar tersebut kurang diminati masyarakat (Naldi, 2008).

Sembilan tahun kemudian terbit surat kabar *Pelita Ketjil*, dimana edi perdananya tanggal 1 Februari 1886. Surat kabar ini terbit di Padang di bawah pimpinan seorang Belanda Tuan Moss, dan kemudian dilanjutkan Tuan Dosseau. Terakhir pimpinannya beralih kepada Datuk Sutan Maharaja. Surat kabar ini dicetak pada percetakan Edward van Muijen. Menurut Hendra Naldi, merupakan *Pelita Ketjil* surat kabar ini adalah tertua berbahasa melayu di Minangkabau, bahkan di Pulau Sumatera. Meskipun kehadirannya bukan sepenuhnya atas usaha orang pribumi, tapi sudah dipimpin oleh orang pribumi, tetapi kepemilikan perusahaan masih dimiliki orang Indo yakni H. A. Mess. Datuk Sutan Maharaja berhenti atau meletakkan jabatannya sebagai pimpinan *Pelita ketjil* pada 1895. Dari beberapa sumber yang penulis dapatkan, Datuk Sutan Maharaja memang pimpinan surat kabar tersebut, namun ia pimpinan ketiga sesudah Tuan Moss dan Tuan Dosseau. Menurut hemat penulis, ini merupakan surat kabar pertama dipimpin rakyat pribumi. Meskipun surat kabar *Bentara Melayu* yang tertua bermahasa melayu masih dipimpin oleh orang Indo, apalagi surat kabar yang berbahasa belanda yang tidak mungkin orang pribumi jadi pimpinannya.

Setelah berhenti dari *Pelita ketjil*, pada 1985 Datuk Sutan Maharaja bersama Burhanuddin Sutan Radjo Nan Gadang memimpin surat kabar *Warta Berita* terbitan Padang. Surat kabar tersebut dimodali oleh saudagar pribumi terkenal Abdul Manan Sutan Maradjo. Akan tetapi betahannya juga tidak lama, dan sepuluh tahun kemudian tidak terdengar lagi. Kemudian juga ada dua surat kabar kejasama Indo,

¹ Sastri Sunarti, *Op, Cit*, h 46, Erman, *Ibid*, h 35, Yulianne Darwis, *Op, Cit*, h 58

pribumi, dan Cina, yakni *Pertja Barat* 1893 dan *Tjaja Soematra* 1897. Beberapa surat kabar periode lainnya adalah *Wasir Hindia* pada tahun 1903 dibawah pimpinan St. Rajo Nan Gadang, *Bintang Sumatera* tahun 1903 dipimpin Lim Sun Hian, serta *Warta Berita* tahun 1908 dengan pimpinan masih St. Rajo Nan Gadang. Selain itu juga ada surat kabar *Bintang Sumatera* pada 1903 dan *Sinar Sumatera* tahun 1905 dibawah pimpinan Lim Sun Hian serta *Sinar Minangkabau* tahun 1894 oleh penerbit Baharouddin di Padang.

Masa perkembangan atau kegemilangan

Zaman ini merupakan masa puncak bagi perkembangan surat kabar di Minangkabau. Dalam kurun waktu ini, surat kabar sudah semakin maju, dalam artian menjamurnya penerbitan, segmen surat kabar juga beragam, serta lokasi penerbitan tersebar di beberapa lokasi di Minangkabau. Salah satu ciri-ciri surat kabar pada masa ini adalah dominan surat kabar berbahasa melayu yang diterbitkan oleh orang Minangkabay atau pribumi. Ciri lain surat kabar periode ini adalah pergolakan yang cukup sengit sesama “urang awak” dan “urang atau awak” atau pribumi versus kaum penjajah. Maraknya penerbitan surat kabar di Minangkabau, dikarenakan sebagian percetakan dan penerbitan sebagian sudah dilola sendiri oleh orang Minang atau pribumi. Meski awalnya usaha tersebut berada di tangan penjajah, namun lambat laun dapat menjalin kerjasama dengan pengusaha asing seperti Eropa-Indo dan Tionghoa untuk menjalankan percetakan dan penerbitan itu. Selain itu, ramainya penerbitan surat kabar juga dikarenakan keterlibatan pengusaha pribumi di bidang percetakan dan penerbitan, dimana ini dimulai pada awal abad ke-20.

Bentuk atau tampilam surat kabar pada periode ini sangat beragam, ada yang bentuknya seperti surat kabar atau majalah yang kita kenal saat ini. Akan tetapi juga ada hanya dicetak dengan mesin stensilan atau disablon memakai kertas ukuran folio, dan tidak jarang menggunakan tulisan tangan. Untuk waktu terbitnya juga bervariasi, ada yang teratur satu kali atau dua kali seminggu, bahkan harian. Mayoritas surat kabar, halamannya berjumlah empat dan delapan halaman. Sementara untuk majalah terbit satu minggu, dua minggu, atau satu bulan sekali dengan jumlah halaman yang bervariasi. Keberagaman media massa lokal di Minangkabau pada awal abad ke-20 juga dapat dilihat dari tema atau segmennya. Dalam perkembangannya, dari segi tema atau segmen setidaknya dapat kelompok surat kabar umum, agama, adat, dan ekonomi. Dari keempat itu, tema atau segmen umum dan agama yang dominan, dibanding tema adat dan ekonomi masing-masing dua media massa. Selain itu juga ada dengan segmen atau tema lain ,seperti politik, organisasi profesi, kampung halaman, dan gender.

Surat kabar daerah atau milik orang Minangkabau juga terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan *Alam Minangkabau* dan ada juga menyebutkan *Oetusan Melajoe*. Jika dilihat dari tahun mulai terbitnya, memang *Alam Minangkabau* lebih dahulu dibanding, dimana ia mulai terbit 1904, sedangkan *Oetusan Melajoe* baru terbit pada 1911. Dari tahun terbitnya dapat disimpulkan bahwa surat kabar milik orang Minang pertama itu adalah *Alam Minangkabau*. Pemiliknya awalnya adalah Haji Mohd. Salleh dan Haji Mohd. Amin usaha kedua tokoh ini dilanjutkan oleh Mahyoeddin Datuk Soetan Maharadja yang pada tahun 1911 mendirikan percetakan dan penerbitan Perserikatan Orang Alam Minangkabau. Sedangkan pendapat kedua terkait surat kabar *Oetusan Melajoe* dipimpin oleh Datuk Sutan Maharadja. Tahun pertama surat kabat ini masih dicetak pada perusahaan

Cina, namun satu tahun kemudian baru mendirikan perusahaan percetakan dengan nama *Snelpersdrukkerij Orang Alam Minangkabau*. Surat kabar *Oetusan Melajoe* selanjutnya dicetak pada perusahaan tersebut. Jika diamati kedua pendapat tersebut dapat dipahami “benang merahnya”, bahwa *Alam Minangkabau* memang lebih tua dibanding *Oetusan Melajoe*.

Setelah itu menjamur penerbitan surat kabar di Minangkabau. Untuk tema umum, terbit *Saudara Hindia* pada 1913, *Sumatera Tengah* 1914, *Minangkabau Bergerak* 1919, dan lain sebagainya. Sementara untuk segmen agama lahir surat kabar *Al-Munir* pada 1911, *Soeloeh Melajoe* tahun 1913, *Al-Mizan* 1918, *Al-Bajan* 1920, dan banyak surat kabar lainnya. Adapun untuk tema adat muncul *Boedi Tjaniago* tahun 1922, *Barito Minangkabau* tahun 1926. Surat kabar dengan tema ekonomi juga tidak kalah ketinggalan, pada 1914 terbit *Sjarikat Oesaha* dan *Pemberita Oentoek Memadjoekan Peroesahaan Anak Indonesia* atau disingkat POMPAI pada 1929. Untuk lebih detail mengenai surat kabar yang terbit di Minangkabau pada abad ke-20 dapat dilihat pada Tabel 1, diantaranya:

Tabel 1. Daftar Surat Kabar pada Masa Penjajahan Belanda

No	Nama surat kabar	Tahun terbit	Lokasi	Segmen/tema
1	Tjaja Soematra	1908-1933	Padang	Umum
2	Warta India	1909-1926	Padang	Umum
3	Oetoesan Melayoe	1912-1926	Padang	Umum
4	Al-Munir	1911-1916	Padang	Islam
5	Soenting Melayoe	1912-1921	Padang	Islam
6	Saoedara Hindia	1913-1914	Kajoe Tanam	Umum
7	Soeloeh Melayoe	1913-1915	Padang	Islam
8	Soematra Tengah	1914-1915	Padang	Umum
9	Bintang Timoer	1914-1914	Padang	Islam
10	Syarikat Oesaha	1914-1914	Padang	Ekonomi
11	Soeara Koto Gadang	1916-1925	Bukittinggi	Kampung halaman
12	Al-Mizan	1918-1921	Maninjau	Islam
13	Pelita Matoer	1918-1920	Matoer	Umum
14	Loeroes	1919-1919	Padang	
15	Minangkabau Bergerak	1919-1919	Bukittinggi	Umum
16	Ma'loemat	1920-1920	Bukittinggi	Umum
17	Al-Bayan	1920-1921	Bukittinggi	Islam
18	Al-Itqan	1920-1923	Maninjau	Islam
19	Aboen Goeroe-Goeroe	1921-1931	Bukittinggi	Organisasi profesi
20	Berita Balai Derma	1921-1921	Bukittinggi	
21	Soematra Bergerak	1921-1923	Bukittinggi	Umum
22	Boedi Tjaniago	1922-1922	Padang Panjang	Adat
23	Doenia Akhirat	1922-1925	Bukittinggi	Islam
24	Noesa Hindia	1922-1923	Padang	Umum
25	Pelita Moeslim	1922-1922	Bukittinggi	Islam
26	Pemberita Hindia	1922-1922	Padang	Umum
27	Soeara Banoe hampoe	1922-1922	Bukittinggi	Umum
28	Soeara Momok	1923-1923	Padang	Umum
29	Pemandangan Islam	1923-1923	Padang Panjang	Islam
30	Saraso Samaloe	1923-1923	Pariaman	Umum
31	Kebenaran	1923-1924	Padang	Islam
32	Djago-Djago	1923-1925	Padang Panjang	Islam

33	Pewarta Islam	1925-1925	Bukittinggi	Islam
34	Adabiyah	1925-1925	Padang	Islam
35	Soeara Tambang	1925-1925	Sawahluntu	
36	Panas	1925-1925	Padang	Politik
36	Petir	1925-1925	Padang	
37	Jong Soematra	1925-1925	Padang	
38	Soeara Boemi Poetra	1925-1925	Padang	
39	Boeka mata	1925-1925	Padang	Islam
40	Asraj	1925-1928	Padang	
41	Soeara Kaoem Iboe	1925-1930	Padang Panjang	
42	Pertimbangan	1925-1930	Padang	Umum
43	Bartiko Minangkabau	1926-1926	Bukittinggi	Adat
44	Soeara Moerid	1926-1926	Padang Panjang	
45	Pelita Ketjil	1928-1929	Lintau	Umum
46	Noeroel Yaqin	1929-1930	Bukittinggi	Islam
47	Barito Koto gadang	1929-1929	Bukittinggi	Umum
48	Perdamaijan	1929-1929	Bukittinggi	Islam
49	POMPAI	1929-1931	Padang	Ekonomi
50	Soeara Minang	1929-1929	Payakumbuh	Umum
51	Soeloeh Koto Ampek	1929-130	Talawi	Umum
52	Soeara Perempuan	1918	Padang	Gender

Masa kemunduran

Pada masa pendudukan Jepang di Sumatera Barat, situasi dunia penerbitan dan percetakan mengalami perubahan yang sangat drastis. Sedikit sekali surat kabar dan majalah yang berasal dari periode sebelumnya yang mampu bertahan. Sifat pemerintahan tentara pendudukan yang militeristik dan represif membuat media massa (terutama surat kabar) tidak berkembang dengan baik. Pemerintah Jepang melarang atau memberangus semua surat kabar dan majalah yang terbit semenjak zaman Belanda. Dengan kondisi demikian masa ini dinamakan masa kemunduran.

Kebijakan pemerintahan tentara ke-25 yang berkuasa di Sumatera, bahwa setiap *shu* (keresidenan), hanya boleh terbit satu surat kabar berbahasa melayu. Dengan kebijakan tersebut hanya satu surat kabar terbit pada awal pemerintahan Jepang, yakni *Padang Nippo*. Surat kabar tersebut mulai terbit di Padang pada tahun 1942. Akan tetapi semenjak tahun 1944 penerbitannya dipindahkan ke Padang Panjang. Adapun surat kabar lain yang terbit di Sumatera Barat adalah *Sumatora Simbun*. Surat kabar ini memakai huruf Kanji, karena penerbitannya lebih ditujukan kepada orang Jepang yang berdomisili di daerah tersebut. Pada awalnya *Sumatora Simbun* terbit di Padang, namun kemudian dipindahkan ke Padang Panjang, seperti surat kabar *Padang Nippo*.

Pemberitaan yang disampaikan sebagian besar berupa propaganda Jepang tentang berbagai janji kebaikan yang akan diwujudkan serta berita kemenangan demi kemenangan yang diraih Jepang di medan laga. Pada intinya yang diberitakan dan ditampilkan selalu mengenai kebaikan Jepang. Sementara tentang daerah atau orang daerah yang menderita akibat sistem pemerintahan yang militeristik dan represif tidak pernah diberitakan sekalipun. Pemerintahan Jepang juga memanfaatkan sumber daya yang dimiliki orang Melayu dan Cina untuk menggerakkan kedua surat kabar tersebut. Karena mereka telah lama melalang-melintang dan pengalaman dalam dunia jurnalistik, dibutuhkan untuk memperkuat kedua surat kabar itu. Intinya, mau tidak mau mereka dipaksa harus bekerja sama dengan Jepang.

Masa Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, ada dua bentuk utama surat kabar yang terbit, yakni nasionalis dan pro Belanda. Surat kabar yang pro Belanda ini adalah surat kabar milik Belanda dan ada juga milik warga pribumi. Surat kabar yang berhaluan nasionalis jelas mendukung kemerdekaan, isinya menyuarakan semangat juga dan cinta tanah air. Pasca proklamasi kemerdekaan, pada tahun itu juga terbit beberapa surat kabar, diantaranya: *Berjuang* oleh Bustanuddin Ismail di Padang Panjang, *Utusan Sumatera* yang diterbitkan Bariun A. S. Sementara di Kota Padang juga hadir *Pedoman Kita* yang diterbitkan Yusja dan Decha, di Bukittinggi lahir *Kedaulatan Rakyat* oleh Adinegoro pada Oktober 1945, serta *Demokrasi* oleh Yusja dan M Yusuf di Padang Panjang. Tidak hanya surat kabar, majalah juga muncul, misalnya majalah *Menara* oleh Buya Hamka dan *Haskim* yang diterbitkan Muhammadiyah.

Setelah itu menyusul terbit *Penerangan* tahun 1946 oleh Oei Tin Jin dan sekaligus jadi pimpinannya. Pada tahun yang sama di Padang muncul *Suara Sumatera* yang diterbitkan Lie Un Sam. Surat kabar ini dipimpin oleh S. Alauddin, akan tetapi usianya tidak panjang. Namun pemiliknya kembali menerbitkan surat kabar lain, yakni *Harian Penerangan*. Beberapa surat kabar lain yang terbit pada masa revolusi diantaranya *Detik*, *Panca Sila*, *Aksi*, *Genderang Sahid*, *Mata Rakyat*, *Menara Rakyat*, *Gunung Singgalang*, *Haluan*, serta *Riak Buana*.

Hampir semua surat kabar tersebut terbit dalam waktu terbatas, dan formatnya beragam. Dari segi bentuk, jug masih standar dan dicetak dalam stensilan atau sablon semata. Adapun oplahnya berkisar antara 500 sampai 1.000 eksemplar, dan beredarnya juga di wilayah yang terbatas. Sementara *Haluan*, perkembangannya signifikan pada akhir 1959 atau setelah pengakuan kedaualatan. Surat kabar nasionalis yang sebelumnya berkantor di Bukittinggi kemudian beralih ke Padang. Rentang waktu 1945 hingga 1950 ini juga disebut dengan periode perjuangan. Periode ini kehadiran media massa, baik surat kabar, majalah tidak berorientasi pada keuntungan atau finansial. Tujuan utamanya adalah untuk ikut serta menggelorakan semangat perjuangan. Karena, hampir tidak ada surat kabar pada masa ini yang mampu bertahan lama atau usianya hanya selama periode perjuangan ([Darwis & Khusairi, 2018](#)).

1. Masa Demokrasi Liberal

Keadaan pers pada masa ini banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi nasional pada waktu. Kehidupan pers mencerminkan suasana dan kebebasan politik yang berkembang dalam masa Liberal ([Ermanto, 2005](#)). Hal ini juga berlaku di daerah, khususnya Sumatera Barat. Demokrasi Liberal dan Sistem Pemerintahan Terpimpin ikut berdampak terhadap perkembangan pers di Sumatera Barat. Pada masa ini juga dikenal dengan istilah “politik adalah panglima”. Melihat kondisi demikian, beberapa tokoh di daerah juga ikut ramai-ramai untuk mendirikan surat kabar. beberapa tokoh dan organisasi yang mendirikan surat kabar diantaranya, Partai Islam Nahdlatul Ulama menerbitkan koran *Duta Masyarakat*. Kemudian, Partai Nasional Indonesia (PNI) juga mendirikan surat kabar *Res Publik*. Sementara Partai Komunis juga tidak mau ketinggalan, dan merekapun menerbitkan Koran *Harian Penerangan*.

2. Orde Lama

Kekalah dari perang saudara pada peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), menimbulkan semangat untuk bangkit bagi masyarakat

Sumatera Barat. Akibat peristiwa tersebut berdampak luar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu langkah untuk memulihkan keterpurukan itu adalah melalui media massa. Pada tahun 1963 berkumpul sejumlah masyarakat Sumatera Barat yang berprofesi wartawan di Jakarta, dan berencana mendirikan surat kabar. Pada tahun itu juga terbitlah surat kabar *Aman Makmur* di Padang, dengan motto “untuk pembangunan daerah demi kejayaan bangsa”. Surat kabar itu dinahkodai oleh Syaifullah Alimin, Marthias Duski Pandoe, M Hamidy, dan Darmalis. Selain itu tujuannya juga untuk mengimbangi propaganda komunis terhadap masyarakat melalui surat kabarnya *Suara Persatuan*. Surat kabar *Aman Makmur* mengalami perkembangan yang cepat. Akan tetapi pada 1965, tepatnya bulan Maret surat kabar ini diberangus oleh pemerintah Orde Lama.

Beberapa bulan kemudia terbit surat kabar *Berita Yudha*. Hal ini salah satunya dikarenakan karyawan surat kabar *Aman Makmur* kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan. Surat kabar *Berita Yudha* kemudian menjadi harian *Angkatan Bersenjata*. Pengelola media ini sehari-hari adalah Zuiyen Rais, Radjilis Kamil, dan Pasni Syata. Sedangkan petinggi surat kabar *Aman Makmur*, seperti Syaifullah Alimin, Marthias Duski Pandoe, M Hamidy, dan Darmalis hanya berperan dibelakang layar.

3. Orde Baru

Pada awal Pemerintahan Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan 1974 merupakan masa “bulan madu” antara pers dengan pemerintah Orde Baru. Tahun pertama kepemimpinan Soeharto melahirkan sejumlah kebijakan yang berpihak kepada pers yakni Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966. Lahirnya aturan tersebut, juga membatalkan peraturan yang dibuat Pemerintah Orde Lama seperti Perpres Nomor 6/1964 tentang pembinaan pers. Lahirnya Nomor 11 Tahun 1966 memberikan kebebasan bagi pendirian industri pers, maupun menerbitkan kembali industri pers yang pernah dibredel oleh rezim sebelumnya.

Masa “bulan madu” antara pers dengan Pemerintahan Orde Baru, di Sumatera Barat kembali diterbitkan surat kabar *Harian Haluan* dan *Aman Makmur*. Surat kabar tersebut pada tahun 1964 pernah dibreidel pada masa Pemerintahan Orde Lama karena pemberitaannya yang dianggap dapat merongrong kekuasaan Soekarno. Selain penerbitan kembali, pengusaha pers Sumatera Barat memanfaatkan kesempatan itu untuk mendirikan industri pers. Beberapa perusahaan pers yang lahir, diantaranya *Harian Singgalang* yang terbit perdana pada 1968. Pada tahun yang sama lahir juga *Angkatan Bersenjata* yang didirikan oleh Wardjono. Surat kabar ini terbit berbentuk harian, sedangkan *Singgalang* terbit tiap tiga hari sekali. Tiga tahun kemudian atau pada 1971 juga lahir surat kabar harian dengan nama *Semangat*. Selain surat kabar harian, ada juga jensianya mingguan yang bernama *Canang*, ia mulai terbit tahun 1980, dan beberapa tahun sebelum lengsernya Orde Baru kembali *Limbago*. Media massa yang mulai muncul 1994 dengan format bulanan ini mengambil segmen adat dan budaya ([Angraini, 2006](#)).

Pada tahun 1975, Pemerintah Orde Baru berubah menjadi otoriter dan tidak lagi menjalankan tekadnya yang semula, yakni melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Semenjak itu, kebebasan pers mulai dikekang dan industri pers dibayang-bayangi kasus pembreidelan. Pemerintah bahkan kembali mengeluarkan ketentuan baru yang membuat gerak kehidupan pers semakin sempit. Pengekangan terhadap pers, tersebut dimulai setelah terjadinya Peristiwa Malari pada 1974.

Akan tetapi, pembreidelan terhadap surat kabar atau wartawannya yang ditangkap karena pemberitaan itu jarang sekali bahkan tidak ada terjadi di Sumatera Barat. Hal itu, dikarenakan pemberitaaa yang tergolong “lunak” terhadap penguasa. Kehidupan pers di Sumatera Barat selama Orde Baru berkuasa tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Aturan dan kebijakan itu cenderung represif dalam mengendalikan pers. Akibatnya pers di Sumatera Barat tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan sebagai alat panyampai pesan dalam masyarakat. Sementara itu, upaya “pembinaan” pers oleh Orde Baru juga dilakukan dengan cara membuat kebijakan yang mengharuskan pers menyebarkan informasi sampai ke wilayah pedesaan. Pers dijadikan sebagai perantara antara pemerintah dengan rakyat. Keputusan Menti Penerangan No 203/A/KEP/MEMPAN/1997, mengharuskan pers daerah memiliki akses kepedesaan melalui program Koran Mauk Desa (KMD). KMD bagian propaganda pemerintah Orde Baru dengan dalih menyukseskan pembangunan, dimana secara tidak langsung lembaran KMD digunakan sebagai wahana penyampaian dan sosialisasi program-program pemerintah.

Sejak dikeluarkan aturan tentang KMD, hampir semua surat kabar memiliki lembaran KMD. Surat kabar yang masuk dalam program KMD adalah *Harian Singgalan, Haluan, dan Semangat*, serta *Mingguan Canang*. Dalam pengelolaan KMD, pemerintah biaya operasional KMD pada tahun pertama pelaksanaan tahun 1997 pemerintah menyubsidi sebesar Rp 21,66, -/eksemplar, sementara harga 1 (satu) eksemplar surat kabar Rp 50,-. Secara teknis pemerintah memang memberikan otonomi, misalnya menyangkut tataletak, artistik, dan sebagainya. Akan tetapi, dari segi isi atau *content* pemberitaan, pemerintah melakukan standar tertentu. Sumber pemberitaan haruslah bahan penerangan mengenai kebijakan program pembangunan yang telah dikerjakan pemerintah.

Adanya peraturan *Partnership* atau kerjasama antara media lokal dan pemerintah daerah, di satu sisi cukup mengekang independensi pers karena daya kritisnya akan berkurang atau hilang. Akan tetapi pada sisi lain kondisi tersebut cukup menguntungkan dalam aspek bisnisnya. Setidaknya untuk biaya terbit sudah dijamin dan disubsidi pemerintah. Jaringan pemasaran akan semakin luas, kantor instansi pemerintah menjadi pelanggan tetapnya.

4. Reformasi

Reformasi memberikan suatu perkembangan bagi kehidupan di Indonesia, salah satunya dalam dunia pers. Pada masa ini, pers mendapatkan kebebasan, sebab pada rezim sebelumnya merasa terbelenggu. Kebebasan itu, berupa kebebasan berserikat, berpendapat, dan mengkritisi pemerintah ([Djuroto, 2002](#)). Kebebasan tersebut juga mengembalikan independensi pers sebagaimana mestinya ([Saripudin H. A., 2003](#)). Dengan demikian pers tidak lagi dibayangi-bayangi oleh penutupan atau breidel jika melakukan kritik kepada pemerintah.

Kebebasan ini juga ditunjukkan dengan dipermudahnya pengurusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), dari 16 menjadi tiga tahapan. Selanjutnya pemerintah dibawah pimpinan Presiden BJ Habibie menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Aturan sebagai bentuk jaminan kebebasan bagi pers sebagai salah satu hak azazi warga negara ([Susanto, 2010](#)). Akibat longgarnya pengurusan izin perusahaan dan kebebasan pers, banyaknya muncul industri pers, baik itu di nasional sampai ke tingkat lokal. Masing-masingnya kelompok berlomba-lomba mendirikan industri pers, sehingga perusahaan pers bagaikan tumbuhnya

jamur di kala musim hujan. Untuk Sumatera Barat, rentang waktu 1999 hingga 2003 setidaknya sudah ada 52 industri pers yang berdiri. Jumlahnya mencapai 10 kali lipat dibanding sebelum era reformasi, yang hanya ada enam perusahaan pers. setelah tahun 2003 sampai 2018 masih banyak industri pers yang lahir di Sumatera Barat.

Selama dua dekade era Reformasi, dari sekian banyak industri pers yang lahir, tidak semuanya yang mampu bertahan. Surat kabat yang tidak terbit lagi atau gulung tikar tersebut jumlah jumlahnya bukan satuan atau belasan, bahkan puluhan. Bagian ini penulis akan memaparkan beberapa perusahaan pers yang masih aktif menjalankan aktivitas jurnalistik di Sumatera Barat. Untuk mengetahui keberadaan perusahaan pers ini, dapat diketahui melalui Serikat Penerbitan Surat Kabar (SPS), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers yang dapat diakses melalui situs resminya www.dewanpers.or.id, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bisa dilihat di <https://kpi.go.id/id/>. Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat ratusan perusahaan pers yang ada di Sumatera Barat. Bentuknya juga beragam, ada harian, mingguan, bulanan.

Dari penelusuran di Situs Resmi Dewan Pers setidaknya ada 41 perusahaan pers yang terdata di lembaga tersebut. Bentuk-bentuk produknya juga beragam, ada yang cetak dalam bentuk surat kabar dan ada yang daring atau *online*. Sementara untuk jenis surat kabar waktu terbitnya juga beragam, ada yang harian dan mingguan. Sementara untuk produk pers yang menggunakan perangkat elotronik juga tidak kalah banyaknya. Dari penelusuran di situs resmi KPI, setidaknya ada 52 perusahaan radio swasta yang menjalankan fungsi pers di Sumatera Barat. Selain itu juga ada tujuh TV lokal di Sumatera Barat.

Penulis mengakui, data mengenai jumlah perusahaan pers di Sumbar pascareformasi ada beberapa versi. Dari yang penulis temukan ada tiga kategori, yakni data Serikat Penerbitan Surat Kabar (SPS), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Dewan Pers. Walau demikian, masih ada perusahaan yang menjalankan tugas jurnalistik di Sumatera Barat tetapi perusahaan pers tidak tercantum pada salah satu dari tiga data diatas. Data dari ketiga versi tersebut masing-masing memiliki sisi kelemahan. *Pertama*, data SPS, meski SPS merupakan kumpulan organisasi percetakan surat kabar, namun belum semua yang mendaftarkan dan masuk menjadi keanggotaannya. *Kedua*, versi PWI, juga memiliki sisi lemah, karena PWI bukan perkumpulan perusahaan media, melainkan organisasi profesi. Kalaupun ada data dari PWI itu hanya diambil dari data masing-masing anggota, karena untuk menjadi keanggotaan PWI harus mencantumkan media tempat calon bekerja. *Ketiga*, dari Dewan Pers sebagai lembaga independen yang mengurus media.

Dari ketiga data diatas, penulis lebih cenderung kepada data yang dirilis oleh Dewan Pers. beberapa alasannya, diantaranya data tersebut mencakup sebagian besar industri pers yang ada di Sumatera Barat. Cakupannya lebih besar jika dibanding dua data lainnya. Meski demikian, bukan berarti tidak memakai data dari PWI dan SPS, namun ketiga data tersebut dipergunakan untuk melihat kondisi pers Ranah Minang dewasa ini. Kebebasan pers tidak hanya berdampak bagi perusahaan semata, melainkan juga bagi masyarakat. Dengan ramainya media massa, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang beragam dan dari berbagai sisi. Ramainya surat kabar yang terbit membuat persaingan merebut pangsa pasar semakin sengit. Setiap media juga dutuntut tampil beda menyajikan informasi. Jika informasi yang disampaikan sama, pembaca cukup membaca satu media saja. Dengan cara tampil beda itu, media massa akan dipilih oleh pembaca dan juga laris

di pasaran karena masyarakat membutuhkannya.

Kebebasan memilih isi atau konten surat kabar juga menjadi salah satu bagian dari kebebasan pers. Setiap perusahaan pers bebas memilih kemana arah pemberitaannya, tergantung misi media masing-masing. Untuk mengetahui misi media tersebut dapat dilihat dari jenis pemeritaan yang disampaikan. Untuk di Sumatera Barat, jika diamati, ada dua sifat media massa berdasarkan jenis pemberitaannya, yakni:

a. Umum

Pada bagian ini, pemberitaan surat kabar bersifat umum, seperti ekonomi, politik, budaya, hiburan, olahraga, pendidikan, dan lainnya. Sebagian besar surat kabar yang ada di Sumatera Barat masuk atau memilih kategori ini.

b. Khusus

Dari sisi lain, ada surat kabar yang memilih arah pemberitaannya pada satu topik, dan itu menjadi ciri khas tersendiri baginya. Hanya satu surat kabar yang fokus pada segmen ini, yaitu *Posmetro Padang*. Surat kabar tersebut setiap harinya memberikan informasi yang menyangkut kejahatan dan kriminal, bahkan cara penyampainya sedikit agak vulgar.

Selain dua kategori diatas, apabila dilihat dari fokus pemberitaannya, juga banyak menyajikan informasi yang menyoroti kinerja pemerintah. Pers di Sumatera Barat setelah reformasi lebih leluasa menjalankan fungsi kontrolnya. Hal ini juga dapat terlihat dari motto setiap surat kabar. *Harian Haluan* bermottokan “Mencerdaskan kehidupan masyarakat”, surat kabar ini rutin mengkritisi pemerintah mulai semenjak berdiri. Walaupun pernah dibredel oleh pemerintah Orde Lama karena dianggap mendukung PRRI dan kembali terbit 1969, namun tidak berhenti mengkritik pemerintah yang sedang berkuasa sampai sekarang.

Kemudian, *Harian Singgalang* memiliki motto “Membina harga diri untuk kesejahteraan Nusa dan Bangsa”. Isi pemberitaan surat kabar ini bersifat menunjang pembangunan di Sumatera Barat. Walau demikian, bukan berarti tidak ada kritik terhadap penguasa. Sementara itu, *Harian Padang Ekspres* yang lahir setahun setelah reformasi atau 1999, mottonya “Koran Nasional dari Sumatera Barat”. Tahun 2001 menyusul hadirnya *Harian Posmetro Padang*. Koran yang memilih tema kriminal tersebut bermotto “Kritis, Dinamis, dan Terpercaya”.

Selanjutnya, harian Rakyat Sumbar yang mulai terbit April 2010 mengemukakan motto “Untuk Indonesai. Satu tahu berikutnya, *Harian Koran Padang* kembali menambah data persuratkabaran Ranah Minang. Media massa ini bermottokan “Berani Menyampaikan, Bijak Mengkritisi”. Pada 2014 Surat kabar Metro Andalas yang awalnya terbit dua minggu ini mengusung motto “Demi Keutuhan Indonesia”. Saat ini, surat kabar Metro Andalas sdah terbit dalam bentuk mingguan. Sementara puluhan surat kabar mingguan juga memiliki motto yang beragam.

Tidak hanya pendirian perusahaan pers arah pemberitaan surat kabar, kebebasan pers juga diiringan ramainya organisasi atau serikat profesi. Sebelum reformasi, di Sumatera Barat hanya ada PWI, namun setelah reformasi lahir dua organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Organisasi-organisasi tersebut juga salah satu bentuk kemerdekaan, sebab sebelum reformasi pemerintah hanya mengakui satu wadah profesi atau dinamakan wadah tunggal, yaitu PWI ([Firdaus, 2019](#)).

Tantangan pers di Sumatera Barat dewasa ini cukup beragam. Secara umum tantangan itu dapat dikelompok dalam dua hal, yakni tantangan internal dan

eksternal. Dari segi internal, surat kabar dihadapi oleh tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemilik perusahaan. Tantangan ini mempengaruhi sangat mempengaruhi kelangsungan sebuah surat kabar. Dari segi sumber daya manusia, jika SDM suatu surat kabar kurang berkualitas atau standar saja tentunya produk yang dihasilkan biasa-biasa saja dan tidak cari pembaca. Sementara tantangan eksternal ini adalah mereka yang akan menjadi objek dalam pemberitaan dan pemasaran produk suatu surat kabar. Tantangan ini didominasi oleh penyelenggara atau pemangku kepentingan, seperti pemerintah, TNI, Polri, produsen barang atau jasa, dan masyarakat.

Tantangan internal dan eksternal tersebut dampaknya adalah bagi pendapatan perusahaan. Apabila pendapat tidak memenuhi biaya operasional, disinilah keberlangsungan suatu perusahaan pers terancam. Meski ini merupakan hal klasik, tapi banyak membuat surat kabar di Sumatera Barat tidak beroperasi atau terbit lagi. Tidak dipungkiri, sejak era Reformasi kebebasan pers banyak penerbitan surat kabar yang awalnya mengebu-gebu, tapi akhirnya hilang oleh seleksi alam. Apalagi bagi perusahaan pers yang tanpa persiapan dan konsep, tentu tidak akan lama bertahan. Meski ada kelonggaran soal prosedur pendirian perusahaan pers, seharusnya sebelum penerbitan perlu dilakukan segmentasi pasar terlebih dahulu, setelah itu baru menyiapkan pekerja pers yang memiliki kompetensi sesuai standar.

Jika proses-proses prapenerbitan ini dilakukan oleh suatu perusahaan pers tersebut akan mampu bersaing. Sebaliknya, jika penerbitan dilakukan dengan gegabah maka dapat dipastikan tidak akan bertahan lama. Kondisi tersebut akan diperparah, apabila modal pendirian yang minim. Ketika surat kabar tidak laku dipasaran dan tidak dapat menutupi operasional, maka solusi terakhirnya tentu dihentikan sementara penerbitannya bahkan, juga selamanya. Selain media yang menjalani proses sejak prapenerbitan, media yang mampu bertahan adalah mempunyai ciri khas serta bersikap profesional. Ciri khas itu, misalnya budaya, politik, ekonomi, ataupun fokus kepada investigasi. Bagaimanapun sengitnya persaingan, apabila media memiliki karakteristik tersendiri maka akan dicari pembaca. Sementara dari segi profesionalitas, jika suatu media teraluna maka kepentingan perusahaan atau pemilik media, biasanya cenderung cepat ditinggal pembaca.

Kesimpulan

Pers memiliki sejarah panjang di Sumatera Barat yang dapat dikelompokkan menjadi dua fase utama: penjajahan dan kemerdekaan. Pada fase penjajahan, periode awal ditandai surat kabar berbahasa Belanda yang didominasi orang Indo-Eropa; periode 1900–1942 menandai kemajuan dengan penguasaan percetakan oleh orang Minangkabau, meski masa Jepang (1942–1945) menyebabkan kemunduran total akibat pembredelan. Memasuki fase kemerdekaan, pasca-proklamasi 1945 muncul surat kabar seperti Berjuang, Utusan Sumatera, dan majalah Menara yang berfokus menggelorakan semangat perjuangan tanpa orientasi finansial; masa Liberal (1945–1950) ramai didirikan media oleh partai politik seperti Duta Masyarakat (NU) dan Res Publika (PNI), meski terganggu PRRI dan pembredelan Orde Lama seperti Aman Makmur (1963). Awal Orde Baru (1966–1974) menjadi "bulan madu" dengan kebijakan berpihak, tapi sejak 1975 berubah otoriter dengan pembredelan massal; era Reformasi membuka kebebasan lewat UU No. 40/1999, memunculkan ratusan media

di Sumatera Barat—cetak, daring, radio, televisi didorong transformasi teknologi dan budaya digital yang membuat produk online mengalahkan surat kabar tradisional.

References

- Angraini, N. (2006). *Pers Sumatera Bara Pascareformasi; Studi Tentang Harian Padang Ekspres 1999-2003*. Univesitas Andalas.
- Darwis, Y. (2013). *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau 1859-1945*. Pt. Gramedia Kompas.
- Darwis, Y., & Khusairi, A. (2018). Dinamika Islam Indonesia: Media Massa Sebagai Instrumen Gerakan. *Jurnal Komunika*.
- Djuroto, T. (2002). *Manajemen Penerbitan Per*. Pt. Remaja Rosdakarya.
- Ermanto. (2005). *Wawasan Jurnalistik Praktis*. Cinta Pena.
- Fauzi, A. Y. (2017). Manajemen Pers Samarinda Pos Dalam Menghadapi Persaingan Pers Dikota Samarinda. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 5(4), 119–133.
- Firdaus, H. (2019). *Wawancara Di Padang*.
- Naldi, H. (2008). *Booming Surat Kabar Di Sumatra Westkust*. Ombak.
- Saripudin H. A., Q. H. (2003). *Citra Media: Analisa Berita Pers Indonesia*.
- Sunarti, S. (2013). , *Kajian Lintas Media, Kelisanan Dan Keberaksaraan Dalam Surat Kabar Terbitan Awal Di Minangkabau 1959-1940*. Kpg.
- Supriyanto, D., & Yusuf, I. A. (2007). Pers Dan Teknologi Media: Dejurnalisasi Di Tengah Konvergensi. *Jurnal Komunikasi*.
- Suryati, I. (2014). *Jurnalistik Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia.
- Susanto, E. (2010). *Hukum Pers Indonesia*. Rineka Cipta.
- Thaib, E. J. (2014). Wartawan Sebagai Da ' I. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 147–158.